



 **PILPRES**
8 JULI 2009

1



Hj. Megawati Soekarnoputri

H. Prabowo Subianto

2



Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Prof. Dr. Boediono

3



Drs. H. M. Jusuf Kalla

H. Wiarto SH.

Visi Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Peserta Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009



**MEDIA
CENTER**



ELECTIONS-MDP

Multi-Cover Programme Support to Indonesia's Democratic Elections



KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta • Telp. (021) 3193 7223 Fax. (021) 315 7759
<http://www.kpu.go.id> • <http://mediacenter.kpu.go.id>



Hj. Megawati Soekarnoputri

H. Prabowo Subianto

PASANGAN MEGAWATI-PRABOWO (NOMOR URUT : 1)

A. CALON PRESIDEN

Nama Lengkap : Dyah Permata Megawati Setyawati
 Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 23 Januari 1947
 Agama : Islam
 Status perkawinan : Menikah
 Suami : Taufik Kiemas
 Anak : Tiga orang.

Riwayat Pendidikan:

- SD Perguruan Cikini Jakarta Tahun 1954-1959
- SLTP Perguruan Cikini Jakarta Tahun 1960-1962
- SLTA Perguruan Cikini Jakarta Tahun 1963-1965
- Fakultas Pertanian UNPAD Bandung Tahun 1965-1967
- Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Tahun 1970-1972

Pengalaman Organisasi:

- Aktivistis GMNI Tahun 1965-1972
- Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat Tahun 1993-1998
- Ketua Umum DPP PDI Tahun 1998-sekarang

Pengalaman Pekerjaan :

- Anggota DPR/MPR Periode 1987-1992, 1992-1997, 1999 Pimpinan Fraksi PDI dan Anggota BKSAP DPR.
- Wakil Presiden Republik Indonesia Oktober 1999 - 23 Juli 2001.
- Presiden Republik Indonesia 23 Juli 2001-2004.

Lain-Lain :

- Pembicara SESKOAD, SESKOGAB, SESKOAU Tahun 1994-1996.
- Peserta Konferensi Wanita Islam International di Pakistan Tahun 1994.
- Mengikuti Konferensi *Intern Parliamentary Union*.

B. CALON WAKIL PRESIDEN

Nama Lengkap : H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Oktober 1951
Agama : Islam
Status Perkawinan : Pernah Kawin
Anak : Satu orang

Pekerjaan:

- Pengusaha

Riwayat Pendidikan:

- SD di Hongkong.
- SMP di Zurich.
- SMA di American School In London, U.K. Tahun 1968
- Akabri Darat Magelang Tahun 1970 - 1974
- Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD Tahun 1987

Pengalaman Pekerjaan:

- Perwira TNI Angkatan Darat Tahun 1974 - 1988
- Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Tahun 1996 - 1998
- Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Tahun 1998
- Direktur Utama PT. Tidar Kerinci Agung Indonesia sampai sekarang
- Direktur Utama PT. Nusantara Energy Indonesia sampai sekarang
- Direktur Utama PT. Jaladri Nusantara sampai sekarang
- Direktur Utama PT. Kertas Nusantara sampai sekarang

Pengalaman Organisasi:

- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2004-Sekarang.
- Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) sampai sekarang
- Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) sampai sekarang
- Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Pengalaman Kursus:

- Kursus Dasar Kecabangan Infanteri Tahun 1974
- Kursus Para Komando Tahun 1975
- Counter Terrorist Course GSG-9, Germany Tahun 1981
- Special Force Officer Course, FT Benning USA Tahun 1981

Visi dan Misi Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto 2009-2014

Visi

Gotong Royong Membangun Kembali Indonesia Raya yang Berdaulat, Bermartabat, Adil, dan Makmur.

Misi

- Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat.
- Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan.
- Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif.

Program Utama Bidang Ekonomi

1. Kebijakan Fiskal yang Efektif

Kebijakan fiskal selama ini tidak mengarah pada penguatan ekonomi secara jangka panjang, yang disebabkan karena kebiasaan untuk menggunakan anggaran defisit yang membebani APBN. MEGA PRABOWO akan menjalankan kebijakan fiskal yang visioner untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, termasuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak maupun PNPB dan menghindari hutang luar negeri

2. Kebijakan Moneter yang Mendorong Sektor Riil Serta Reformasi Arsitektur Finansial Global

Tantangan dalam bidang moneter adalah mengatasi tantangan ketersediaan likuiditas bagi penguatan sektor riil, inflasi serta ketidakstabilan nilai rupiah. MEGA PRABOWO akan bekerja sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan demi penguatan sektor riil dan untuk ambil bagian dalam reformasi arsitektur finansial global

3. Regulasi Pasar Finansial

Pasar finansial menjadi penyebab krisis finansial akibat kapitalisasinya yang luar biasa besar, tetapi sifatnya yang tidak stabil. MEGA PRABOWO akan memastikan aturan yang lebih ketat terhadap pasar finansial dan mendorong kontribusinya bagi perekonomian sektor riil.

Program Utama Bidang Kedaulatan Bangsa

1. Memperkuat Pertahanan Negara dan Kedaulatan Bangsa

Sistem keamanan nasional merupakan salah satu bagian dari sistem nasional yang dibangun untuk mencapai tujuan nasional di bidang keamanan nasional, yaitu melindungi kedaulatan bangsa. MEGA PRABOWO akan mendorong revisi Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, sehingga teknis operasionalisasi kebijakan pertahanan negara dapat mengatur tentang bagaimana mekanisme koordinasi dalam menghadapi gradasi eskalasi ancaman akan dilakukan.

2. Dewan Keamanan Nasional

Kita belum punya doktrin keamanan nasional, doktrin pertahanan luar, doktrin keamanan dalam negeri, dan doktrin diplomasi internasional. MEGA PRABOWO akan mendorong lahirnya UU Keamanan Nasional, yang akan merumuskan pembentukan Dewan Keamanan Nasional, sebagai badan yang berwenang mengkoordinasikan seluruh kebijakan.

Program Utama Bidang Sosial Politik

1. Penyederhanaan Partai Politik dan Efisiensi Pembuatan Kebijakan Publik

Banyaknya partai politik peserta pemilu tanpa ada pembeda dalam hal ideologi dan program membuat sulit rakyat untuk memilih sesuai dengan keyakinannya dan berdampak pada landasan demokrasi. MEGA PRABOWO berpendapat bahwa penyederhanaan jumlah parpol peserta pemilu perlu untuk dilakukan melalui seleksi dan persyaratan yang ketat.

2. Otonomi Daerah yang Efektif dan Potensi Desa

Tingkat keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah bergantung pada partisipasi masyarakat di daerah. MEGA PRABOWO akan memberikan kerangka hukum bagi pemberdayaan, partisipasi serta perluasan otonomi daerah, terutama di tingkat desa, agar dapat secara optimal memanfaatkan potensi lokal yang ada; memperjuangkan legislasi serta revisi kebijakan yang pada intinya akan melindungi hak-hak sipil masyarakat daerah, terutama di desa, di samping menumbuhkembangkan kesadaran serta kewajiban mereka sebagai warga negara; dan mendorong warga desa yang mengenal kepala desa/lurahnya untuk berperan lebih aktif untuk ikut bersama-sama merumuskan program-program pembangunan desa.

3. Reformasi Birokrasi

Problem serius seperti pelayanan yang lambat, KKN, struktur yang gemuk masih menjangkiti birokrasi di Indonesia, sehingga keberadaannya tidak berjalan maksimal. MEGA PRABOWO akan mereformasi birokrasi agar dapat berperan maksimal dalam menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; memberikan perlindungan dari ancaman dan gangguan internal maupun eksternal; menjamin keadilan dalam dinamika ekonomi dan persaingan usaha; dan menjamin keberlanjutan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

4. Koordinasi Antar Sektor Demi Efektifitas Implementasi Kebijakan

Masing-masing departemen seringkali bertindak dan menjalankan program secara sendiri-sendiri tanpa mengetahui konsekuensinya serta kemungkinan terjadinya tumpah tindih. Hal yang juga berdampak pemborosan anggaran pembangunan dan membuat agenda pembangunan tidak terintegrasi dan terarah. MEGA PRABOWO berkeyakinan bahwa harus ada kepemimpinan langsung dan kuat oleh presiden dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor.

5. Penegasan Politik Luar Negeri yang Bebas-Aktif

MEGA PRABOWO akan kembali menegaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, yang dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. MEGA PRABOWO menafsirkan prinsip bebas aktif sebagai sebuah situasi bagi Indonesia untuk bebas memilih dengan siapa ia bisa memajukan kepentingan nasionalnya secara aktif.

6. Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Politik

Selama pemerintahan masa transisi, telah terjadi kemajuan status perempuan yang cukup berarti, namun realitas ketimpangan gender masih persisten. MEGA PRABOWO berkeyakinan bahwa pencapaian hak perempuan masih perlu mendapat dukungan afirmatif dengan menjamin kesamaan akses perempuan untuk pengambilan keputusan dan kepemimpinan; dan mengintegrasikan perspektif jender dalam perundangan, kebijakan publik serta program-program pembangunan.

Program Utama Bidang Hukum

1. Politik Peraturan Perundangan

Politik Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu problem dan tantangan serius untuk membangun dan menegakkan hukum demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum untuk perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat. MEGA PRABOWO akan menyusun disain dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan; meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; memperkuat kerjasama antar lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

2. Penataan Kelembagaan Negara

Pembangunan kelembagaan negara telah mengalami pergeseran dan perubahan setelah Amandemen Konstitusi UUD 1945 Sistem ketatanegaraan mengenai Kelembagaan Negara mengalami pergeseran dan perubahan. MEGA PRABOWO akan membangun Kelembagaan Negara yang terukur, terfokus, terarah, efektif dan efisien dapat menciptakan kepastian dan kejelasan keberadaan lembaga negara demi untuk rakyat.

3. Optimalisasi Struktur dan Aparatur Pelayan dan Penegak Hukum

Optimalisasi struktur dan aparatur pelayan dan penegak hukum menjadi problem dan tantangan mendesak untuk dilaksanakan. Struktur dan aparatur secara formal sudah bertugas namun secara substansial belum atau kurang menunjukkan kualitas komitmen dan kinerja yang optimal. Pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggungjawab jajaran struktur dan aparatur hukum berkaitan dengan upaya menjadikan hukum sebagai alat perjuangan mensejahterakan rakyat. Apabila aparatur pelayan hukum tidak kredibel dan tidak profesional akan mengakibatkan rakyat semakin kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap hukum itu sendiri.

4. Promosi dan Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM)

MEGA PRABOWO melihat pelaksanaan HAM di Indonesia masih belum seimbang antara pelaksanaan Hak Sipil-Politik dengan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasca reformasi pelaksanaan HAM masih sebatas pada hak sipil-politik warga untuk lebih bebas berekspresi dan berpartisipasi, sementara hak sosial, ekonomi dan budaya warga masih belum dipenuhi secara maksimal, terutama hak atas pekerjaan dan bertempat tinggal. MEGA PRABOWO bertekad memenuhi hak warga atas pekerjaan dan perumahan, sehingga pelaksanaan HAM di Indonesia lebih utuh dan seimbang.

Program Utama Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pendidikan Terjangkau untuk Rakyat

Komersialisasi pendidikan membuat biaya pendidikan semakin mahal, sehingga banyak anak-anak yang tidak mampu bersekolah. MEGA PRABOWO secara tegas menolak seluruh kebijakan dan tindakan yang mengarah kepada komersialisasi pendidikan. MEGA PRABOWO akan berjuang agar pendidikan dasar (SD-SLTP) tanpa dipungut biaya; pendidikan menengah (SLTA) di sekolah negeri tidak dipungut biaya; pendidikan tinggi yang terjangkau; dan menyediakan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan ilmu dan teknologi unggulan.

2. Partisipasi Sekolah Meningkat

Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah. Banyak peserta didik yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga angka putus sekolah masih tinggi. Angka putus sekolah masih tinggi karena biaya pendidikan yang makin tinggi. MEGA PRABOWO akan berupaya memperluas akses pendidikan; dan menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak telantar.

3. Reformasi Kurikulum Pendidikan

Materi kurikulum yang cenderung tumpang tindih dan terlalu banyak tanpa mempertimbangkan relevansi dengan minat dan kemampuan peserta didik, sehingga membebani peserta didik. MEGA PRABOWO akan mendorong reformasi materi kurikulum; pemberlakuan *automatic promotion* di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan sistem magang berbasis kompetensi di jenjang pendidikan tinggi.

4. Keadilan Pendidikan Antar Wilayah

Perbedaan antar wilayah dalam pelayanan pendidikan dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan, menyebabkan disparitas yang tajam tingkat pendidikan di setiap wilayah. MEGA PRABOWO akan berjuang agar fasilitas dan pembangunan infrastruktur pendidikan dibangun secara merata di setiap wilayah dengan memprioritaskan wilayah-wilayah tertinggal dan melakukan rekrutmen guru yang berkualitas dan menjaga keseimbangan distribusi ketersediaan guru di wilayah tertinggal yang didukung dengan pemberian kemudahan fasilitas, insentif, jaminan hidup yang memadai dan promosi karir yang jelas.

5. Memperkuat Budaya Lokal

Globalisasi selain memberikan manfaat yang memudahkan kita dalam mengakses sumber-sumber informasi, juga mempunyai dampak negatif berupa melemahnya perhatian dan minat masyarakat terhadap ekspresi dan kearifan budaya lokal, MEGA PRABOWO akan melaksanakan program untuk melindungi tradisi atau hasil budaya lokal yang dianggap mulai punah dan memberikan insentif sosial ekonomi kepada kerja-kerja kebudayaan.

6. Sistem Monitoring Konflik Nasional

Pasca reformasi, beragam konflik sosial yang sifatnya kolektif banyak terjadi di Indonesia. MEGA PRABOWO akan mengembangkan sistem monitoring konflik nasional, yang dilakukan secara sistematis, sehingga konflik yang akan terjadi dapat diantisipasi sejak awal.

7. Kesadaran Keragaman Budaya

Masih banyak ditemui konflik sosial secara kolektif, dan di masa mendatang indikasi konflik masih berpotensi terjadi. MEGA PRABOWO akan memberikan jaminan politik dan perlindungan hukum kepada setiap kelompok masyarakat dalam mengekspresikan praksis kebudayaan; dan menekankan tindakan tegas terhadap kelompok masyarakat yang mencoba menghalang-halangi suatu masyarakat lainnya dalam melakukan ekspresi budaya; dan mendorong pendidikan keragaman.

PROGRAM AKSI

Program Aksi Mega-Prabowo 2009-2014 terdiri dari delapan program yang disebut sebagai delapan program untuk kemakmuran rakyat. Program aksi tersebut adalah:

1. Menjadikan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat.
2. Mencapai perekonomian yang berdaulat, adil, dan makmur.
3. Melaksanakan ekonomi kerakyatan.
4. Membangun kedaulatan pangan dan energi.
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif dalam melayani masyarakat.
6. Menciptakan sumberdaya manusia bangsa yang unggul, berpendidikan, sehat, dan berkepribadian dalam budaya melalui pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.
7. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
8. Membangun infrastruktur untuk rakyat di pedesaan melalui delapan program desa.

- I. **Program aksi untuk menjadikan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat antara lain:**
 1. Menjadwalkan kembali utang luar negeri dan mengalihkannya untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan dan energi, yang murah serta ramah lingkungan.
 2. Menyelamatkan kekayaan negara dengan meninjau kembali kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional.
 3. Menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 4. Mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas pembiayaan ekspor impor dari negara untuk menyimpan dana hasil ekspornya di bank dalam negeri.
 5. Melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk membangun perumahan dan apartemen mewah, mall, serta proyek-proyek mewah lainnya.

- II. **Program aksi untuk kedaulatan ekonomi antara lain:**
 1. Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi.
 2. Membangun industri pengolahan untuk memperoleh nilai tambah.
 3. Meningkatkan pendapatan per kapita dari USD 2.000 menuju USD 4.000.
 4. Membangun sarana dan prasarana transportasi massal.

- III. **Program aksi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.**
 1. Prioritas penyaluran kredit perbankan kepada petani, nelayan, dan pedagang tradisional dan pedagang kecil.
 2. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil.
 3. Melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar yang tidak sesuai dengan undang-undang.
 4. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk buruh migran (TKI dan TKW).
 5. Modernisasi pasar tradisional untuk pedagang tradisional dan pedagang kecil.
 6. Meningkatkan anggaran untuk petani, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.
 7. Memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar.

- IV. **Program Aksi Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi**
 1. Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk peningkatan produksi beras, jagung, kedele, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang.
 2. Membangun pabrik pupuk Urea dan NPK milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton.
 3. Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW).
 4. Mendirikan kilang-kilang minyak pabrik *bioethanol* dan pabrik DME (pengganti LPG).
 5. Mencetak 4 juta hektar lahan untuk aren (bahan baku *bioethanol*) yang dapat mempekerjakan 24 juta orang. Pembukaan lahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor bahan bakar nabati setelah 7 tahun masa tanam (4 juta hektar hutan aren menghasilkan sekitar 56 juta mt *ethanol*/tahun).

- V. **Program Aksi Menyelenggarakan Pemerintah yang Tegak, Bersih dan Efektif dalam Melayani Rakyat.**
 1. Meningkatkan kesejahteraan aparaturnegara.
 2. Mempercepat reformasi birokrasi.
 3. Penegakan hukum dan penangangan korupsi tanpa pandang bulu.

VI. Program Aksi untuk Pendidikan Kesehatan dan Kebudayaan

1. Wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara.
2. Mengganti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
3. Menghapus pajak buku pelajaran dan menghentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun.
4. Membagi sedikitnya 1 juta laptop kepada mahasiswa, guru dan pengajar.
5. Memberikan beasiswa dan fasilitas kredit untuk membiayai mahasiswa potensial yang kurang mampu.
6. Melaksanakan kembali program KB (Keluarga Berencana).
7. Meningkatkan peran PKK, Posyandu, dan Puskesmas.
8. Menempatkan sarjana dan dokter baru melalui program pemerintah terutama di kantong-kantong kemiskinan.
9. Menggerakkan Revolusi Putih dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin.
10. Mengembangkan karakter bangsa yang berkepribadian dalam bidang kebudayaan dan melestarikan peninggalan serta warisan budaya bangsa.

VII. Program Aksi untuk Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup

1. Melakukan penghijauan kembali 59 juta hektar hutan yang rusak serta konservasi aneka ragam hayati dan hutan lindung.
2. Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai.
3. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan.
4. Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa.

VIII. Program Aksi Membangun Infrastruktur untuk Rakyat di Pedesaan melalui Delapan Program Desa.

1. Listrik dan air bersih desa.
2. Bank dan lembaga keuangan desa.
3. Koperasi desa, lumbung desa, pasar desa.
4. Klinik desa.
5. Pendidikan desa.
6. Infrastruktur pedesaan dan daerah pesisir.
7. Rumah sehat pedesaan.
8. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Prof. Dr. Boediono

PASANGAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO-BOEDIONO (NOMOR URUT: 2)

A. CALON PRESIDEN

Nama Lengkap : Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
 Lahir : Pacitan, Jawa Timur 09 September 1949
 Agama : Islam
 Isteri : Kristiani Herawati
 Anak : Dua orang

Pendidikan :

- Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akbar) Tahun 1973
- American Language Course, Lackland, Texas-AS Tahun 1976
- Airbone and Ranger Course, Fort Benning-AS Tahun 1976
- Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning - AS Tahun 1982 - 1983
- On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg-AS Tahun 1983
- Jungle Warfare School, Panama Tahun 1983
- Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman Tahun 1984
- Kursus Komando Batalyon Tahun 1985
 - Sekolah Komando Angkatan Darat Tahun 1988 - 1989
 - Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas - AS Tahun 1988 - 1989
 - Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri Tahun 1988 - 1989

- Doctorate (Dr) Institut Pertanian Bogor, Indonesia Tahun 2004

Riwayat Pekerjaan :

- Presiden Republik Indonesia Tahun 2004 - sekarang
- Menko Polkam, Kabinet Gotong Royong 10 Agt. 2001 - 12 Mar 2004
- Menko Polsoskam, Kabinet Persatuan Nasional 26 Okt. 2000 - 01 Juni 2001
- Mentamben, Kabinet Abdurrahman Wahid 20 Okt. 1999 - 26 Agt. 2000
- Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) ABRI 16 Feb. 1998 - Nov. 1998
- Panglima Kodam II Sriwijaya 23 Agt 1996 - 26 Agt 1997
- Kepala Staff Kodam Jaya Maret 1996 - Agt. 1996
- Kepala Pengamat Militer PBB di Bosnia dari UNPF (United Nation Peace Force) Nov. 1995 - Nov. 1996
- Komandan Korem Pamungkas 072 Yogyakarta Tahun 1994 - 1995
- Assisten Operasi Kodam Jaya Tahun 1994
- Komandan Brigade Infantry 17, Kujang I Kostrad Tahun 1993

Penghargaan :

- Lencana Adi Mahakarya dari Presiden Republik Indonesia sebagai Lulusan Terbaik Akabri Tahun 1973
- Honour Graduated IOAC, USA Tahun 1983
- Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik Tahun 2003

Pangkat Terakhir :

Jenderal TNI, 25 September 2000 Pensiun 10 November 2000

B. CALON WAKIL PRESIDEN

Nama Lengkap : Dr. Boediono
 Lahir : Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943
 Agama : Islam
 Isteri : Herawati
 Anak : Dua orang

Pendidikan :

- S1 : Bachelor of Economics (Hons.), University of Western Australia Tahun 1967
- S2 : Master of Economics, Monash University, Melbourne, Australia Tahun 1972
- S3 : Doktor Ekonomi Bisnis Wharton School University of Pennsylvania, Amerika Serikat Tahun 1979

Pekerjaan :

- Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada
- Direktur III Bank Indonesia Urusan Pengawasan BPR Tahun 1996-1997
- Direktur I Bank Indonesia Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter Tahun 1997-1998
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kabinet Reformasi Pembangunan Tahun 1998-1999
- Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong Tahun 2001-2004
- Menteri Koordinator bidang Perekonomian menggantikan Aburizal Bakrie pada Reshuffle I Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2005-2009

Visi dan Misi

Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono

2009-2014

Visi

Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

Misi

- Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.
- Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi.
- Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Visi dan misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Program aksi di bawah ini dipandang mampu menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Prioritas 1: Program Aksi Bidang Pendidikan

1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
3. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
4. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.
5. Memperbaiki renumerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.
6. Memperluas penerapan dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
7. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
8. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal.

Prioritas 2: Program Aksi Bidang Kesehatan

1. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih.

2. Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.
3. Mempermudah pembangunan klinik atau rumah sakit yang berkualitas internasional baik melalui profesionalisasi pengelolaan rumah sakit pemerintah maupun mendorong tumbuhnya rumah sakit swasta.
4. Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif.
5. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan TBC.
6. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2014 dari keadaan terakhir sekitar 18%.
7. Revitalisasi program keluarga berencana yang telah dimulai kembali dalam periode 2005-2009 akan dilanjutkan dan diperkuat.
8. Upaya pencapaian dalam bidang kesehatan tidak tercapai jika kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil tidak memadai.
9. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari mal-praktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab.
11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara menghindarinya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban.
12. Evakuasi, perawatan, dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam.

Prioritas 3: Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan

1. Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai inti dari program kemiskinan yang sudah dimulai sejak 2007 dengan mengekspansi jumlah kecamatan yang tercakup dalam PNPM dan alokasi dana per kecamatan yang terus ditingkatkan sesuai dengan kinerjanya.
2. Melanjutkan program pengarusutamaan semua program penanggulangan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga sebagai pendukung program PNPM (PNPM pendukung).
3. Penyempurnaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi atau kebocoran dapat dihindari.
4. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan.
5. Pengembangan program-program berlapis untuk rakyat miskin yang dilakukan secara intensif, antara lain: Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin.
6. Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.

Prioritas 4: Program Aksi Penciptaan Lapangan Kerja

1. Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda.
2. Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi baik di pusat maupun di daerah, sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta.
3. Reformasi tingkat mikro-ekonomi, antara lain perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap

tenaga kerja Indonesia, dilakukan melalui kebijakan sektoral dan kerja sama dengan pemerintah daerah.

4. Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA, dan perusahaan global) untuk berinvestasi di Indonesia.
5. Memperluas permintaan domestik di luar barang-barang konsumsi, serta memanfaatkan pasar regional.
6. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian Indonesia yang sangat besar.
7. Pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus seperti Batam, Bintan, Karimun, Suramadu, Sabang dan berbagai kawasan khusus lainnya.

Prioritas 5: Program Aksi Pembangunan Infrastruktur Dasar

1. Melanjutkan pelaksanaan *dual track strategy* dalam pembangunan infrastruktur, yaitu memperluas kesempatan bagi masyarakat (baik swasta nasional maupun asing) untuk berpartisipasi secara transparan, adil, bebas dari kepentingan kelompok, bersih, dan kompetitif dalam pembangunan dan pengoperasian kegiatan infrastruktur.
2. Menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, pemerintah tetap akan mempertahankan fungsi regulasi yang fair kepada setiap pelaku dan konsumen.
3. Untuk mendukung partisipasi swasta dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan penjaminan resiko oleh pemerintah dapat diberikan secara selektif berdasarkan kriteria yang obyektif, matang, terukur, transparan, dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Melakukan *unbundling* pembangunan infrastruktur di mana pemerintah akan menanggung pembangunan infrastruktur dasar, sementara badan usaha menanggung pembangunan yang bersifat komersial untuk berbagai infrastruktur penting di daerah.
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sifatnya non komersial.
7. Meningkatkan pembangunan telekomunikasi pita lebar untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan.
8. Dalam rangka mengatasi bencana alam banjir di berbagai daerah, pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air akan terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Jakarta.

Prioritas 6: Program Aksi Ketahanan Pangan

1. Memperbaiki infrastruktur pertanian dengan peningkatan anggaran di bidang pembangunan dan perbaikan irigasi, saluran air, jalan raya, kereta api, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar.
2. Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan risiko yang dapat dijaga.
3. Memperbaiki kebijakan penyediaan dan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan, penyelundupan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak.
4. Perbaikan sistem distribusi dan logistik, termasuk pergudangan secara terintegrasi, dengan memperhatikan *supply chain* agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.
5. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak, dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah.
6. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (*competitive advantage*) dari sektor pertanian di pasar regional dan dunia,

terutama pada komoditas yang merupakan produk utama dan terbesar di kawasan Asia dan dunia seperti CPO, kayu manis, dan lain-lain.

7. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan penciptaan iklim investasi yang baik dan bila perlu diberikan insentif (fiskal) bagi pengembangannya.
8. Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar dari hasil panen yang akurat dan *up to date* kepada petani dan nelayan, harga dan ketersediaan pupuk, peringatan dini cuaca dan wabah sehingga petani dapat lebih cerdas dalam menentukan tindakannya.

Prioritas 7: Program Aksi Ketahanan dan Kemandirian Energi

1. Mendorong diversifikasi penggunaan energi domestik kepada gas alam dan batubara. Program ini akan mengurangi tekanan tambahan permintaan pada sumber energi minyak bumi.
2. Program aksi peningkatan kemandirian energi akan dilakukan secara integratif antara penguasaan teknologi energi, pembangunan infrastruktur, kebijakan harga, dan insentif di dalamnya.
3. Meningkatkan daya tarik dan kepastian investasi untuk eksplorasi dan produksi di bidang pertambangan dan energi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor energi.
4. Meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi dan biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi.
5. Meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas.
6. Melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemakaian energi terbarukan (*renewable energy*) yang konsisten dan sesuai dengan partisipasi dan tanggung jawab Indonesia dalam agenda global untuk mencegah pemburukan iklim dunia (*climate change*) dan memperkuat ketahanan energi nasional.
7. Meningkatkan kegiatan-kegiatan penelitian sektor energi untuk menghasilkan sumber-sumber energi baru non-konvensional, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan penurunan emisi karbon.
8. Peningkatan efisiensi energi untuk mendorong perekonomian, peningkatan kesejahteraan dan memperbaiki daya saing.
9. Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga setiap rakyat Indonesia mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya.

Prioritas 8: Program Aksi Perbaikan dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan

1. Meneruskan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya serta pertanggungjawaban publik.
2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (*merit based*), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sipil.
3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (*business process*), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.
4. Memperbaiki renumerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang.
5. Memperbaiki sistem dan tunjangan pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran.
6. Melakukan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.

Prioritas 9: Program Aksi Penegakan Pilar Demokrasi

1. Mengatur kembali hubungan eksekutif dan legislatif sehingga dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran yang efektif dan seimbang dan terbentuk suatu sistem yang dapat melancarkan tujuan bernegara secara bermartabat.
2. Memperbaiki peraturan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, agar tercapai Pemilu yang jujur, adil, dan dapat menghindarkan warga negara yang kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
3. Memperbaiki administrasi, penganggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu agar terjadi kepastian dan efisiensi kerja insitusi penyelenggara pemilu tanpa mengorbankan kualitas pemilu.
4. Mengembangkan substansi demokrasi, yaitu nilai-nilai hakiki seperti kebebasan, penegakan hukum, keadilan dan rasa tanggung jawab.

Prioritas 10: Program Aksi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

1. Memperbaiki *law enforcement*.
2. Memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian dan kejaksaan melalui reformasi kepolisian dan kejaksaan, perbaikan kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah, baik melalui program *quick win* maupun perbaikan struktural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian dan kejaksaan.
3. Meninjau ulang dan memperbaiki peraturan yang menyangkut penegakan hukum termasuk pengaturan hak-hak polisi, peraturan-peraturan pelaporan, dan aturan pelayanan dari aparat penegak hukum.
4. Mendukung perbaikan administrasi dan anggaran di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
5. Pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih.

Prioritas 11: Program Aksi Pembangunan yang inklusif dan Berkeadilan

1. Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM termasuk dan utamanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha (*entrepreneur*) baru di tingkat kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat.
2. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan transfer anggaran kedaerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (otsus).
3. Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil dengan pemberian anggaran yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan pos penjagaan terluar.
4. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.

Prioritas 12: Program Aksi di Bidang Lingkungan Hidup

1. Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai.
2. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global.
3. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prioritas 13: Program Aksi Pengembangan Budaya

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif di bidang seni dan keilmuan.
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial.
3. Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern, dan tradisional.



Drs. H. M. Jusuf Kalla

H. Wiranto SH.

PASANGAN M. JUSUF KALLA-WIRANTO (NOMOR URUT: 3)

A. CALON PRESIDEN.

Nama Lengkap : M. Jusuf Kalla
 Tempat/Tanggal Lahir : Watampone-Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942
 Agama : Islam
 Status Pernikahan : Menikah
 Nama Istri : Ny. Mufidah Jusuf
 Jumlah Anak : Lima orang
 Pekerjaan : Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009)

Riwayat Pendidikan :
 Fakultas Ekonomi, Universitas Universitas Hasanudin Makassar, Tahun 1967

Pengalaman Organisasi :

- a. Mahasiswa
 - Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHAS Tahun 1964-1966
 - Ketua Umum HMI Cabang Makassar Tahun 1965-1966
 - Ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Sulsel Tahun 1966-1968
- b. Profesi
 - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulsel Tahun 1985-1997
 - Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia Tahun 1997-2002
 - Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Sulsel Tahun 1985-1995

- Wakil Ketua ISEI Pusat Tahun 1987-2000
 - Penasehat ISEI Tahun 2000-sekarang
 - Ketua Umum Ikatan Alumni UNHAS Makassar Tahun 1990-sekarang
- c. Sosial/Pendidikan
- Ketua Yayasan Universitas Muslim Indonesia, Makassar Tahun 1975-1995
 - Ketua Perguruan Islam Datumuseng Makassar Tahun 1975-sekarang
 - Anggota Dewan Penyantun UNHAS, IAIN, IKIP Makassar Tahun 1980-sekarang
 - Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hadji Kalla Tahun 1982-sekarang
 - Ketua Umum Yayasan Pendidikan Al Gazali Makassar Tahun 1990-sekarang
 - Anggota Wali Amanat IPB Bogor Tahun 2002-2006
 - Dewan Penyantun Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Ketua Umum Antar Agama Sulsel Tahun 2004-sekarang

Pengalaman Pekerjaan :

- a. Pemerintahan
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Tahun 1999-2000
 - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Tahun 2001-2004
- b. Legislatif
- Anggota DPRD Sulawesi Selatan Tahun 1965-1968
 - Anggota MPR RI Utusan Golkar Tahun 1982-1987
 - Anggota MPR RI Utusan Golkar Tahun 1987-1992
 - Anggota MPR RI Utusan Daerah Tahun 1992-1997
 - Anggota MPR RI Utusan Daerah Tahun 1997-1999
- c. Golkar
- Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan Tahun 1965-1968
 - Anggota Dewan Penasihat DPD Golkar Sulsel Tahun 1978-1999
 - Anggota Dewan Penasihat DPP Golkar Sulsel Tahun 1999-2004
 - Ketua Umum DPP Partai Golkar Tahun 2004-sekarang
- d. Dunia Usaha
- Direktur Utama CV. Hadji Kalla Tahun 1966-2001
 - Direktur Utama PT. Bumi Karsa Tahun 1969-2001
 - Komisaris Utama PT. Bukaka Teknik Utama Tahun 1988-2001
 - Direktur Utama PT. Bumi Sarana Utama Tahun 1988-2001
 - Direktur Utama PT. Kalla Inti Surya Tahun 1993-2001
 - Komisaris Utama PT. Bukaka Singtel International Tahun 1995-2001

Penghargaan :

- Doktor Honoris Causa dari Universitas Malaya Tahun 2007
- Doktor Honoris Causa dari Universitas Soka, Jepang Tahun 2009
- Menerima Tanda Kehormatan "Commander Del' Odre de Leopold" dari Kerajaan Belgia Tahun 2009

B. Calon Wakil Presiden

Nama Lengkap : H. Wiranto, S.IP., SH
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 4 April 1947
Agama : Islam
Status Pernikahan : Menikah
Istri : Hj. Uga Usaman, SH., M.Si
Anak : Tiga orang

- a. Pendidikan Formal
1. SD Tahun 1959
 2. SMP Tahun 1962
 3. SMA Tahun 1965
 4. Akademi Militer Nasional Tahun 1968
 5. Universitas Terbuka (Fak. Ilmu Sosial & Politik) Tahun 1995
 6. Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer Tahun 1996
- b. Kursus/Pelatihan
1. Sussarpara Tahun 1968
 2. Sussarcab Infantri Tahun 1969
 3. Susjursar Tahun 1972
 4. Suslapa Infantri Tahun 1976
 5. Suspabinlatsat Tahun 1984
 6. Seskoad Tahun 1984
 7. Lemhanas Tahun 1995
- c. Pengalaman Jabatan
1. Dan To 1/C Yonif 713 DAM XIII TMT 01-11-69
 2. Wadan Kima Yonif 713 DAM XIII TMT 01-01-71
 3. Kasi – 1 Yonif 713 DAM XIII TMT 01-01-72
 4. Dan Kima Yonif 713 DAM XIII TMT 01-01-73
 5. Kasi – 4 Yonif 713 DAM XIII TMT 01-04-75
 6. Kasi – 2 Brigif L-18 Kostrad TMT 01-03-78
 7. Dan Yonif – 713 DAM XIII/MDK TMT 14-04-80
 8. Dan Yonif – 713 DAM XIII/MDK TMT 01-07-82
 9. Karotiknik Dirbang Pusif TMT 01-07-83
 10. Kadep Wilnik Pusif TMT 01-05-84
 11. Kas Brigif – 9 Kostrad TMT 01-05-85
 12. Waasops Kas Kostrad TMT 01-08-87
 13. Asops Kasidivis – 2Kostad TMT 15-08-88
 14. Ajudan Presiden RI TMT 01-10-89
 15. Kas Dam Jaya TMT 25-03-93
 16. Pangdam Jaya TMT 01-11-94
 17. Pangkostrad TMT 01-03-96
 18. Kasad TMT 07-06-97
 19. Pangab TMT 11-02-98
 20. Menhankam/Pangab TMT 16-03-98
 21. Menkopolkam TMT 29-10-990
 22. Ketua Dewan Eksekutif IDe Indonesia 2000- Sekarang
 23. Ketua Umum DPP Partai Hanura 2006- Sekarang

- d. Tanda Jasa/Penghargaan
1. BT. Mahaputra Adipradana
 2. BT. Dharma
 3. BT. Yudha Dharma Utama
 4. BT. Kartika Eka Paksi Utama
 5. BT. Jalasenasa Utama
 6. BT. Swa Buana Paksa Utama
 7. BT. Bhayangkara Utama
 8. BT. Yudha Dharma Nararya
 9. BT. Kartika Eka Paksi Pratama
 10. BT. Veteran Timur Tengah
 11. BT. Kehormatan dari Spanyol
 12. BT. Kehormatan dari Australia
 13. BT. Kehormatan dari Belanda
 14. BT. Pingat Jasa Gemilang dari Singapura
 15. BT. Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang (DPKT) dari Brunei Darusallam
 16. BT. Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) dari Pemerintah Malaysia
 17. BT. Kesyetiaan XXIV Tahun
 18. BT. Penegak g-30-S/PKI
 19. BT. Seroja
 20. BT. Wirakarya
 21. BT. Dwija Sistha
 22. Manggala/Wirakarya Kencana

Visi dan Misi

Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto

2009-2014

Visi

Indonesia yang Adil, Mandiri, dan Bermartabat

Misi

- Tercapainya Ekonomi Bangsa yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat.
- Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Demokratis Dengan Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Tepat.
- Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Ketahanan Budaya dan Otonomi Daerah yang Sehat, Efisien dan Efektif untuk Lebih Memantapkan Integrasi Nasional yang Lebih Menjamin Kebhinekaan.
- Mewujudkan Bangsa yang Aman, Tenteram dan Damai Dengan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mewujudkan Indonesia yang Dihormati dan Disegani oleh Bangsa-Bangsa Lain Dalam Bidang Ekonomi dan Politik.

AGENDA KEBIJAKAN

I. BIDANG EKONOMI

1. Membangun Ekonomi Kerakyatan

Menyiapkan kebijakan dan program yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan penghasilan memadai bagi seluruh warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Ini hanya dapat terwujud, dengan menggalakkan berbagai kegiatan investasi dan usaha di sektor riil produktif.

Secara faktual sebagian besar rakyat Indonesia (70%) hingga saat ini, bekerja di berbagai sektor ekonomi berbasis SDA (sumber daya alam) terbarukan (*renewable resources*) termasuk sektor pertanian (tanaman pangan, horti-kultura, perkebunan, dan peternakan; sektor kelautan dan perikanan (perikanan, budidaya, perikanan tangkap, industri bioteknologi kelautan, pulau-pulau kecil, dan *non conventional ocean resources*); dan sektor kehutanan (hutan alam, hutan tanaman industri, dan *agroforestry*), maka seharusnya kita secara *all out* dan sistematis membangun sektor ekonomi sebagai soko guru perkonomian bangsa.

2. Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi

Elemen pokok kesejahteraan rakyat adalah pangan dan energi. Program kemandirian pangan harus diarahkan pada dua tujuan pokok, yaitu meningkatnya kesejahteraan petani dan tercukupinya kebutuhan pangan nasional. Sama halnya dengan pangan, energi adalah kebutuhan pokok. Ketersediannya adalah sesuatu yang esensial untuk menjamin kesejahteraan. Oleh karena itu, pembangunan energi harus diorientasikan pada optimalisasi pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbarui (seperti panas bumi dan energi nabati) guna mencukupi kebutuhan energi nasional.

3. Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Negeri

Kemajuan ekonomi dapat terus ditingkatkan apabila produk-produk yang dihasilkan rakyat mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing akan meningkat apabila kita mampu meningkatkan nilai tambah produk nasional dan peningkatan nilai tambah hanya bisa dihasilkan apabila terdapat industri pengolahan. Dengan dasar ini, maka membangkitkan kembali industri pengolahan adalah pilihan yang tidak bisa ditawar. Namun, kebangkitan industri pengolahan tidak boleh sekadar menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah rendah, melainkan harus diberi penguatan baru yang dapat meninggikan nilai tambahnya. Hanya dengan cara ini, produk nasional mempunyai daya saing, berkelanjutan, dan dapat berkompetisi pada level internasional.

4. Menciptakan Struktur Ekonomi Nasional yang Adil Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah perjuangan yang tidak bisa ditawar. Seluruh kekuatan nasional harus memberi perhatian terhadap kebangkitan Koperasi dan UMKM. Para pelaku usaha yang bergerak dalam dunia koperasi dan UMKM harus diberi stimulus untuk meningkatkan skala usahanya, keterampilan manajemennya, dan memperdalam kandungan teknologi atau inovasi untuk meningkatkan nilai tambahnya. Pemerintah harus memberi jaminan iklim usaha yang kondusif, mendorong munculnya kemitraan antar-pelaku di dalam UMKM serta memperkuat kemitraan dengan usaha besar guna membentuk rantai usaha yang sinergis, saling membutuhkan dan menguntungkan. Tak lupa, dukungan lembaga keuangan harus pula memadai.

5. Menjalankan Reformasi Agraria untuk Kesejahteraan Petani

Reformasi pertanian harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Reformasi tersebut diorientasikan untuk menjadikan pertanian tetap sebagai sektor usaha yang atraktif, menguntungkan, dan menghasilkan komoditi yang dapat mencukupi kebutuhan nasional. Prasyarat penting untuk mencapai tujuan ini adalah adanya reformasi agraria. Reformasi agraria dimaksudkan agar ada jaminan ketersediaan lahan produktif pertanian, jaminan bahwa aset-aset lahan yang dimiliki petani Indonesia tidak mudah dialihfungsikan, dan garansi bahwa aset lahan petani dapat ditransformasikan menjadi modal dan kekuatan bagi pengembangan usaha pertanian. Dengan dasar ini, maka aset-aset lahan petani Indonesia dapat lebih mudah dioptimalkan pemanfaatannya dan didorong produktivitasnya.

6. Anggaran untuk Rakyat

APBN ke depan akan dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat, penghapusan kesulitan hidup, dan pengutamaan kepentingan mayoritas yang lebih besar dibandingkan kepentingan segelintir orang. Sementara itu, untuk anggaran rutin harus semakin efisien. Untuk itu, alokasi dan distribusi anggaran harus mengutamakan sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak, memberi stimulus terhadap sektro riil, serta penyediaan infrastruktur publik yang layak dan memadai. Agenda lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola utang secara bertanggung jawab. Rasio utang terhadap PDB harus semakin diturunkan. Sementara itu, pemanfaatan utang harus dilakukan secara lebih optimal. Utang luar negeri yang terikat dengan program-program yang kaku dan dipaksakan, sudah seharusnya semakin dikurangi.

7. Lembaga Keuangan dan Perbankan yang Mendorong Sektor Rill dan Memihak Rakyat.

Problem penting lembaga keuangan dan perbankan selama ini adalah tingginya risiko kredit sehingga fungsi intermediasinya menjadi rendah. Kredit yang mampu disalurkan ke sektor riil pun sangat jauh berkurang dibandingkan kemampuan portofolionya. Padahal, tanpa adanya dukungan lembaga keuangan dan perbankan yang memadai, dunia usaha tidak mungkin mampu bergerak secara dinamis. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia harus segera mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-

hatian. Perbankan harus didorong untuk secepatnya melakukan konsolidasi sebagaimana skema Arsitektur Perbankan Indonesia dengan penekanan pada kecukupan modal dan pengelolaan risiko. Kelembagaan BPR dan lembaga keuangan mikro lainnya juga harus didorong guna menopang UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

8. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan pokok. Semakin maju ekonomi suatu negara, kebutuhan infrastruktur fisiknya akan semakin berkembang. Begitu juga sebaliknya, apabila pembangunan infrastruktur fisik tertahan, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami hambatan yang serius. Atas dasar ini, pemerintah harus mempercepat program pembangunan infrastruktur yang selama masa krisis tidak banyak mengalami kemajuan.

Infrastruktur yang mutlak mendapat prioritas adalah pembangunan jalan tol untuk di daerah-daerah yang sudah berkembang, pembukaan jalan-jalan baru di daerah yang potensial, serta membuka daerah-daerah yang selama ini terisolir. Jalan trans Kalimantan dan Papua, umpamanya, adalah kebutuhan yang tidak mungkin lagi ditunda. Bersamaan dengan pembangunan jalan, perluasan jaringan kereta api juga sudah sangat mendesak. Jaringan kereta api di Sumatera dan Kalimantan, misalnya, adalah kebutuhan yang sudah sangat mendesak untuk menunjang aktivitas ekonomi di daerah ini yang sekarang sedang mengalami perkembangan pesat. Infrastruktur lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan pelabuhan dan dermaga-dermaga beserta infrastruktur yang mendukungnya.

9. Pembangunan Kelautan

Indonesia adalah negara kepulauan sehingga pengembangan industri maritim masih perlu dipacu. Pengembangan industri maritim harus dikembangkan secara terintegrasi, mulai dari pembangunan industri transportasi laut, pengembangan budidaya hasil laut, pengembangan efisiensi industri penangkapan ikan, hingga industri pengolahan hasil-hasil kelautan beserta industri yang terkait lainnya. Di samping itu, perlu pula dibenahi sistem distribusi dan tata niaga komoditas kelautan. Target penting dari pengembangan industri kelautan ini peningkatan produksi hasil-hasil kelautan sehingga mampu menyamai negara-negara maritim lainnya.

10. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global serta Lingkungan Hidup.

Masalah pokok dalam perubahan iklim dan pemanasan global serta lingkungan hidup adalah bagaimana menurunkan jumlah emisi Gas Rumah Kaca. Hal ini dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi penanaman hutan kembali daerah-daerah yang sudah gundul, mempertahankan hutan lindung/taman nasional yang ada sebagai dasar dari kemampuan alami hutan dalam menyerap CO², penataan TPA, dan usaha konservasi hutan tropis di Indonesia.

Masalah pokok dalam lingkungan hidup adalah menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi dengan upaya melestarikannya. Di sinilah perlunya pemerintah melaksanakan perannya secara adil dan merata sehingga memberi manfaat pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Sektor penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah hutan. Upaya konservasi serta rehabilitasi hutan masih perlu ditingkatkan. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan teknologi, keterampilan, penegakan hukum, dan peninjauan kembali atas perizinan perusahaan hutan sehingga Indonesia tetap menjadi salah satu paru-paru dunia.

II. BIDANG POLITIK DAN HUKUM

1. Memperkuat Sistem Presidensial yang Didukung Sistem Kepartaian yang Sederhana

Agenda penting dalam demokratisasi ke depan adalah memperkuat sistem presidensial. Sistem ini akan kokoh apabila didukung oleh sistem kepartaian yang sederhana dan sistem pemilu yang efisien. Penyederhanaan partai dapat dilakukan dengan memperketat ambang batas

partai yang boleh masuk di parlemen. Kalau sekarang ini hanya 2,5 persen, maka ambang batas untuk periode ke depan harus dinaikkan. Di samping itu, persyaratan pendirian partai baru harus diperketat. Pemilu yang bertingkat-tingkat sudah sangat mendesak untuk didesain ulang agar lebih sederhana dan tidak memboroskan energi. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menyeragamkan waktu pelaksanaan Pilkada dan Pemilu Legislatif.

2. Menata Kembali Fungsi Lembaga-lembaga Negara

Sistem perwakilan yang berlaku sekarang ini menganut sistem tiga kamar, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Namun desain fungsi dan perannya hanya memberi tekanan kepada DPR untuk menjalankan fungsi *budget*, legislasi, dan pengawasan. MPR yang dianggap lembaga tertinggi negara hanya mempunyai fungsi yang sangat terbatas. Sementara itu, DPD tidak mempunyai kewenangan apapun kecuali memberi usul dan masukan kepada DPR. Kondisi ini jelas menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara didorong untuk melakukan penataan ulang agar peran dan fungsinya berimbang dan proporsional.

Di bidang eksekutif, jumlah departemen dan kementerian masih terlalu banyak dan fungsinya bersifat tumpang tindih. Kondisi ini menyulitkan koordinasi dan bahkan menjadi sumber inefisiensi. Untuk itu diperlukan kemauan politik yang kuat dari penyelenggara negara untuk menyederhanakan jumlah departemen dan kementerian agar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi.

3. Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Penyelenggara Negara yang Tangkas, Tanggap, dan Cepat.

Reformasi birokrasi perlu ditingkatkan akselerasinya untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang tangkas, tanggap, cepat, dan adil dalam pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Restrukturisasi organisasi pemerintahan harus dilakukan dengan memperkuat *front office* pelayanan publik yang terukur. Di samping itu, penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) di dalam birokrasi harus ditata ulang. Di sisi lain, KKN harus tetap diberantas.

4. Membangun Politik secara Bermartabat

Moral dan etika politik harus ditegakkan dengan cara bermartabat, sehingga tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak untuk kepentingan politik masing-masing, dalam pelaksanaan berbagai proses pemilihan. Kepada semua kekuatan reformasi prodemokrasi, semua orsospol, para pemimpin gerakan reformasi, LSM, dan komponen pembangunan lainnya diajak untuk bersama-sama memelihara komitmen yakni komitmen reformasi untuk menciptakan masyarakat madani yang demokratis dan bermartabat; dan bukan sebaliknya: buyar, surut, dan berantakan di tengah jalan, karena terdesak dan dikalahkan oleh serentak hadirnya persaingan visi, persaingan kepentingan, persaingan memasuki periode Pilpres.

5. Pendidikan Politik Kader Bangsa

Praktik sistem multi-partai, seringkali terjadi bahwa kepentingan bangsa dikalahkan oleh kepentingan partai. Kepentingan umum dikalahkan oleh kepentingan individu, kelompok, atau golongan. Di sinilah perlunya dikembangkan terus pendidikan politik kader bangsa, bukan pendidikan politik golongan, kelompok, atau partai, dilandasi semangat kebersamaan dan keterbukaan yang merangsang terjadinya dialog dan perdebatan yang sehat. Tujuannya yang ingin dicapai adalah merangsang putra-putra terbaik bangsa yang ingin terjun dalam politik untuk menjadi figur-figur nasional atau calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter, berkomitmen tinggi, mandiri, dan visioner.

6. Jati Diri Bangsa dan Tantangan Global

Nasionalisme modern meniscayakan kemampuan setiap bangsa untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bagi rakyatnya bersama-sama dengan bangsa lain. Diperlukan *good governance*, yaitu pemerintahan yang kompeten, bersih dari KKN, efektif, dan efisien, serta berkomitmen penuh untuk memulihkan harkat dan martabat seluruh rakyat. Dengan format tersebut, bangsa Indonesia akan tegak berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, di tengah arus perubahan global, Indonesia perlu pemimpin-pemimpin yang tegas, visioner, dan berani mengambil risiko yang diperhitungkan serta mampu mengimplementasikan visi bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD'45, ideologi Negara Pancasila, NKRI, dan Kebhinnekaan.

7. Mengefektifkan Hubungan Pusat dan Daerah

Bupati dan Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat telah mendorong kuatnya posisi dan peran kepala daerah. Di satu sisi, hal ini sangat menggembirakan karena menunjukkan le-gitimasi yang kuat dari pemerintahan daerah sehingga memungkinkan untuk melakukan percepatan pelayanan publik. Namun, di sisi lain, situasi itu kerap kali mengganggu efektivitas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat perlu ditingkatkan fungsinya sebagai koordinator dan pengawas dalam semua program-program pembangunan. Untuk itu, revisi UU pemerintahan daerah merupakan keharusan untuk mempertegas fungsi dan peran pemerintah daerah serta menjaga efektivitas hubungan pemerintah pusat dan daerah.

8. Meningkatkan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Kancah Internasional

Indonesia harus proaktif dalam berbagai forum internasional. Peran Indonesia harus terus dimantapkan dalam berbagai forum internasional. Misalnya dalam ASEAN, Gerakan Non Blok, APEC, OKI, PBB dan forum internasional lainnya. Di samping itu, diplomasi ekonomi harus mulai mendapatkan perhatian yang sangat serius. Hal ini dikarenakan agenda-agenda ekonomi nasional, misalnya pengembangan ekspor, sangat membutuhkan dukungan diplomasi ekonomi yang kuat, supaya kepentingan nasional mendapat dukungan dunia internasional.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kendatipun asas-asas penting dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) sudah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundangan, perlindungan HAM tidak selesai dengan perumusan perundangan. Hal penting lainnya adalah bagaimana pemerintah menjaga melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Tugas ini dapat dilaksanakan secara optimal apabila pemerintah secara berkesinambungan mampu membangun etos aparatur negara yang sadar terhadap tugasnya untuk melindungi HAM.

10. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi konstitusi. Ketentuan ini harus semakin dimantapkan agar penegakan hukum dapat berlangsung lebih adil dan tidak memandang latar belakang seseorang. Penegakan hukum harus berlaku untuk semua warga negara karena hukum berlaku untuk semua. Untuk mewujudkan hal ini, institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, harus didorong proaktif dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Lembaga penegakan hukum harus menjadi contoh terdepan dari aparat yang bersih dan bekerja secara profesional.

11. Menciptakan Kepastian Hukum melalui Peraturan Perundangan

Kepastian hukum adalah kebutuhan yang sangat esensial bagi pengaturan kehidupan politik ekonom dan sosial budaya. Tanpa adanya kepastian hukum, interaksi sosial menjadi terhambat dan dapat menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai

agenda menciptakan kepastian hukum dengan mendesain sistem peraturan perundangan yang koheren, antisipatif, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sistem hukum demikian dapat diwujudkan apabila pemerintah bersungguh-sungguh membenahi peraturan perundangan yang compang-camping. Politik hukum tidak boleh sekadar normatif dan legalis, imun dari dinamika masyarakat. Politik hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan nasional kenegaraan dan kebangsaan.

12. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Bagian lain yang juga perlu diperhatikan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah elemen penting bagi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum, niscaya hukum menjadi mandul dan tidak bermakna. Atas dasar ini, maka agenda yang perlu diteruskan adalah menggalakkan sosialisasi kesadaran hukum. Target utamanya adalah menciptakan masyarakat sadar hukum sehingga mengetahui dengan benar hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

III. BIDANG HANKAM

1. Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI

Harus disadari bahwa ancaman dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan negara telah berkembang jauh, seperti infiltrasi melalui teknologi informasi, sengketa perbatasan, maraknya *illegal logging and fishing*, dan bentuk-bentuk ancaman lainnya. Untuk itu, TNI harus terus didorong untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius adalah memperkuat pengamanan daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan. Kehadiran TNI dalam wilayah-wilayah tersebut perlu terus ditingkatkan, baik dari segi personel maupun sarana dan prasarannya, untuk mencegah penyelundupan atau penyerobotan batas negara.

2. Mengikis Tindak Kejahatan, Meningkatkan Keamanan, Ketertiban serta Ketentraman.

Polri sebagai garda depan penjagaan keamanan negara perlu terus ditingkatkan peranannya dalam mengikis tindak kejahatan dan menciptakan keamanan dan ketertiban. Peran ini perlu terus digalakkan mengingat jenis kejahatan telah berkembang luas. Tidak hanya kejahatan konvensional yang menjadi gangguan, melainkan kejahatan kekayaan negara, kejahatan transnasional, hingga berbagai peristiwa yang menimbulkan efek kontijensi. Bahkan belakangan ini, tindak pidana terorisme menjadi ancaman yang sangat potensial. Luasnya ragam gangguan keamanan tersebut menyebabkan Polri dituntut terus-menerus meningkatkan peran profesionalnya.

3. Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) TNI Polri.

Alutsista TNI dan Polri yang sudah tua, harus dimodernisasi. Hal ini mendesak dilakukan agar pertahanan Indonesia semakin kokoh dan kemampuan Polri dalam menangani persoalan keamanan semakin tinggi. Modernisasi alutsista TNI harus dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan industri pertahanan di dalam negeri. BUMN yang bergerak dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan dapat menjadi garda depan modernisasi alutsista. Di samping itu, modernisasi alutsista dapat pula menggandeng berbagai potensi industri dalam negeri lainnya, misalnya PAL untuk perkapalan atau IPTN untuk kedirgantaraan. Strategi memanfaatkan industri di dalam negeri ini perlu terus digalakkan demi mengurangi ketergantungan pada alutsista impor.

4. Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Keamanan

Saat ini anggaran pertahanan jauh dari mencukupi kebutuhan ideal pertahanan NKRI. Sementara itu, kesejahteraan prajurit TNI jauh tertinggal dibandingkan aparaturnya negara lainnya. Padahal, tugas yang diemban harus mempertaruhkan nyawa. Masalah ini perlu segera dibenahi

dan membutuhkan gebrakan tersendiri. Pemerintah harus segera melakukan terobosan di tengah keterbatasan APBN, untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri. Di samping cara konvensional dengan menambah alokasi anggaran untuk TNI, pemerintah dapat pula melakukan terobosan-terobosan lain tanpa harus menyalahi peraturan perundangan..

IV. BIDANG PENDIDIKAN

1. Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pendidikan melalui Sistem Evaluasi yang Proporsional

Problem krusial dalam dunia pendidikan kita adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan. Daerah perkotaan umumnya mempunyai kualitas pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah tertinggal. Masalah ini sudah banyak diupayakan selama pemerintahan sebelumnya, namun masih perlu ditingkatkan. Daerah-daerah yang mempunyai kualitas pendidikan rendah diberi perangsang lebih banyak untuk segera mengejar ketertinggalannya. Di samping itu, agar tidak menimbulkan kecemburuan antar-daerah dan sistem evaluasi pendidikan harus dilakukan secara proporsional. Menyamakan sistem evaluasi pendidikan di kota besar dengan daerah tertinggal jelas menunjukkan ketidakadilannya. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah perlunya memberi akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar berprestasi di daerah-daerah yang relatif tertinggal.

2. Meningkatkan Penyediaan Pendidikan yang Terjangkau melalui Anggaran yang Memadai

Sesuai dengan amanah konstitusi, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan pendidikan dasar. Konstitusi juga menggariskan *budget* yang harus disiapkan sekitar 20 persen dari anggaran negara. Dengan amanah ini, maka program wajib belajar sembilan tahun perlu terus digalakkan. Sekolah gratis yang dimotori sekolah-sekolah pemerintah harus segera ditularkan kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta. Ini semua dalam kerangka memberikan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang memadai dan terjangkau.

3. Mempertegas Pendidikan Kejuruan melalui Diversifikasi Keahlian

Untuk mengantisipasi permintaan tenaga kerja terampil dan semi terampil yang akan terus meningkat, pemerintah mendorong lahirnya sekolah-sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan tidak boleh menumpuk pada bidang tertentu saja, melainkan harus didorong agar tercipta sekolah kejuruan yang mempunyai diversifikasi yang luas. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena permintaan tenaga kerja semakin lama akan semakin spesifik seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, pemerintah harus pula menyiapkan kurikulum sekolah kejuruan yang sejalan dengan tuntutan dunia kerja. Ini semua dimaksudkan agar lulusan sekolah kejuruan sudah siap bekerja. Untuk mewujudkan hal ini, maka konsep *link and match* dunia pendidikan dengan dunia kerja harus diwujudkan.

4. Peningkatan Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat

Perlu ditingkatkan pemberian program-program Bea Siswa kepada masyarakat yang tidak mampu di berbagai jenjang pen-didikan mulai dari tingkat dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Juga peningka-tan pemberian Beasiswa kepada guru dan dosen yang berprestasi

V. BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

1. Meningkatkan Solidaritas Sosial, Kesetiakawanan, dan Memupuk Semangat Nasionalisme

Solidaritas sosial dan kesetiakawanan adalah esensi penting dari kehidupan kebangsaan Indonesia. Pemerintah harus memfasilitasi dan mendorong lahirnya kehidupan multikultur yang lebih baik, yang ditandai oleh penghormatan atas keberagaman dan saling ketergantungan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dan komitmen bersama sebagai satu bangsa. Tujuan ini dapat diwujudkan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari kehidupan kecil dalam rukun tetangga, kelompok-kelompok sosial hingga yang cakupannya luas, yaitu kehidupan kebangsaan

nasional. Untuk mewujudkan hal ini, maka revitalisasi Pancasila sebagai dasar dan komitmen kebangsaan mutlak terus-menerus digalakkan dengan pendekatan baru yang lebih humanis dan tidak doktriner.

2. Pemberdayaan bagi Kalangan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Sesuai amanah konsitusi masalah kemiskinan dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan harus segera diberdayakan, dengan memberikan bimbingan, bantuan, hingga santunan. Akses kalangan miskin terhadap fasilitas dasar dan publik harus dibuka lebar-lebar dan tanpa sama sekali membebani mereka, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, pemerintah sudah seharusnya memberikan bantuan pelatihan, permodalan, akses pasar yang memadai serta bantuan-bantuan lainnya, agar kalangan yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat hidup secara layak, mandiri, dan meningkat kemampuan ekonominya.

3. Pengembangan Modal Budaya dan Modal Sosial

Modal budaya dan modal sosial sebagai sumberdaya yang mampu ditransformasikan menjadi nilai tambah. Wujud nyata modal budaya adalah kearifan lokal (*local wisdom and local genius*) yang direvitalisasikan dan diadaptasikan dengan nilai modernitas sehingga menjadi ikatan dan konsensus yang kuat untuk menumbuhkan kebersamaan dan kreativitas yang mampu mendorong terbentuknya peradaban. Modal sosial dapat berujud dalam bentuk tindakan-tindakan kesetiakawanan, kerjasama (kooperasi), dan gotong royong di berbagai bidang kehidupan. Dengan kelangkaan sumberdaya ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia, maka mengem-bangkan modal sosial adalah suatu langkah strategis mengingat modal sosial tersebut dapat berperan sebagai *complementary* maupun *substitute* dari modal ekonomi.

4. Mengembangkan Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kesenian yang beradab

Budaya yang dikembangkan harus berorientasi pada pengembangan inovasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu perlu didorong budaya baca dan budaya menulis guna membangun masyarakat pembaca (*reading society*), masyarakat belajar (*learning society*), dan masyarakat yang kritis (*critical society*), sebagai basis pengembangan budaya keilmuan dan men-ciptakan masyarakat yang cerdas, inovatif dan produktif. Pengembangan kesenian, sebagai salah satu bentuk ekspresi dari kreativitas, perlu didorong untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan emosional. Pengembangan lptek dan kesenian tetap harus diletakkan didalam kerangka perjuangan meningkatkan harkat martabat dan peradaban manusia.

PEMILIH CERDAS

MEMILIH PEMIMPIN BERKUALITAS

PILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009

SUARA SAH



MENCONTRENG **SATU KALI** PADA SALAH SATU FOTO PASANGAN CALON PADA KOTAK SEGI EMPAT YANG DISEDIAKAN



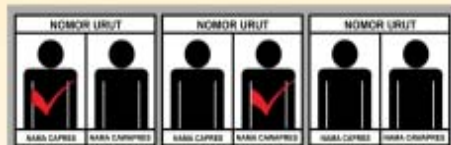
MENCONTRENG **SATU KALI** PADA SALAH SATU NAMA PASANGAN CALON PADA KOTAK SEGI EMPAT YANG DISEDIAKAN

ATAU



MENCONTRENG **SATU KALI** PADA SALAH SATU NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA KOTAK SEGI EMPAT YANG DISEDIAKAN

SUARA TIDAK SAH



MENCONTRENG LEBIH DARI SATU PASANGAN CALON



MENCONTRENG DI LUAR KOTAK SEGI EMPAT YANG DISEDIAKAN

Ingat Contreng Satu Kali!!!

8 Juli 2009 PILPRES (Putaran I)

8 September 2009 PILPRES (Putaran II)*

Komisi Pemilihan Umum

Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat

Telp: 021-3145955, Faks: 021-3145855

Website: www.kpu.go.id

2009

Tanda Pilihanmu

